

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran serta mengidentifikasi faktor-faktor penentu tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari penelitian yang dilakukan untuk menganalisa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Timor Tengah Selatan, jawaban terbanyak dari setiap dimensi yang ada yaitu:
 - a. Fokus Pada Kepentingan Masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, masih dalam kategori yang cukup dalam merencanakan perencanaan yang berdasarkan pada kepentingan masyarakat.
 - b. Dari dimensi Partisipatoris, masyarakat masih kurang diberi kesempatan untuk menyampaikan sumbangan pemikiran dan ide-ide dalam setiap perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan di setiap musyawarah desa, kecamatan, dan kabupaten.
 - c. Dari dimensi Dinamis, masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam hal pelaksanaan perencanaan yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan proaktif masyarakat.

- d. Dari dimensi Sinergitas, perencanaan partisipatif masih kurang dalam menjamin keterlibatan semua pihak dan memperhatikan interaktif diantara stakeholder di daerah serta meningkatkan kerjasama antar wilayah administrasi dan memperhatikan kepentingan strategis daerah.
 - e. Dari dimensi Legalitas, perencanaan partisipatif cukup menjunjung tinggi etika dan tata nilai masyarakat yang ada di Desa masing-masing, serta masyarakat cukup berpartisipasi dalam perencanaan dengan tidak adanya peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
 - f. Dari dimensi Fisibilitas, perencanaan partisipatif cukup sesuai dengan spesifikasi dan ukuran yang diinginkan oleh masyarakat, serta juga perencanaan partisipatif sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 2. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas responden menyatakan bahwa faktor pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan latar belakang sosial budaya merupakan faktor penentu tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
 - 3. Dari Keempat faktor tersebut, 45% responden menilai jenis kelamin merupakan faktor yang paling menentukan tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

4. Selain dari faktor pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan latar belakang sosial budaya, terdapat faktor penentu lain, yaitu faktor kekuasaan elit yang ada di desa.

6.2 Saran

Dari temuan penelitian disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu menyesuaikan program pemerintah dengan kebutuhan (keinginan) yang telah lama dirasakan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
2. Mengoptimalkan enam dimensi yang ada agar tercapai tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat desa/ kecamatan, unsur pembangunan, dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif.
4. Perlu sosialisasi perencanaan dan penganggaran untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai proses perencanaan dan penganggaran agar mereka lebih banyak terlibat dalam proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*
- Anonim. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*
- Anonim. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*
- Abidin, Z, S. 2008. *Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik*. Jakarta, Suara Bebas
- Abe, A. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pusaka Jogja Mandiri
- Adisasmita, R. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta, Graha Ilmu
- Arsyad. 2005. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Kedua*. BPFE: Yogyakarta
- Bastian, I. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta
- Cahyono. 2006. *Metode Pendekatan Sosial Dalam Pembangunan Partisipatif*. Jakarta
- Halim, A. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Pertama*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Hardoyo, dkk. 2008. *Mendahulukan Si Miskin, Buku Sumber Bagi Anggaran Pro Rakyat*. Yogyakarta
- Munir. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Mataram: Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Barat
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta
- Mikkelsen. 2001. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan (Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan)*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

- Ndraha, T. 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Rahayu. 2008. *Strategi Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta
- Sukirno, S. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Edisi Kedua Kencana*. Jakarta
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press
- Tjokrowinoto, 1999. *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi, Kreasi Wacana*, Yogyakarta
- USAID dan LPG. 2006. *Musrenbang Sebagai Instrumen Efektif dalam Penganggaran Partisipatif*. Jakarta: USAID dan LPG
- Widodo, T. 2008. *Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer*. UPP STIM YKPN Yogyakarta
- Wijaya, 2001, *Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*. Tesis Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta